

## Gerakan Petani Melawan Penguasa<sup>1</sup>

Oleh : Zulfahmi Tarigan<sup>2</sup>, Bakaruddin Rosyidi<sup>3</sup>, Asrinaldi<sup>4</sup>

### Abstract

*Farmer radicalism in a struggle movement against agraria policy system have been include in social and political situation in Indonesia since pro independence era until now. One of them has been happen in Desa Nambiki. In this village, a group of farmer have been coopate and claim an agriculture land of PT. PNI. This article will be answer why farmer in Desa Nambiki make a struggle movement. This research use qualitative approach with case study type. Using observation, interview and documentation tenique from this research we know that the struggle movement have been done frontal and non-frontally by increasing organization, local and policy struggle. The struggle happen because there are synergy between two interest, the farmer/internal (economicly) interest and NGO's interest (democracy issue).*

### Pendahuluan

Sebagai sebuah gerakan, aksi perlawanan petani dalam memperjuangkan kepentingannya telah ikut mewarnai dinamika perjalanan kehidupan sosial politik di Indonesia. Sejarah gerakan petani di Indonesia telah dimulai sejak pra kemerdekaan negara Indonesia hingga masa reformasi sekarang ini. Pergantian rezim yang berkuasa di Indonesia menunjukkan gerakan petani tetap menjadi bagian dari dinamika sosial politik yang berlangsung. Dalam masa perjalanan rezim - rezim yang berkuasa di Indonesia, gerakan petani sebagai manifestasi dari konflik yang mereka hadapi selalu berlangsung dalam konteks interaksi antara penguasaan tanah, negara dan rakyat. Pola interaksi tersebut mengatur sebuah sistem yang mengatur struktur-struktur dan pola-pola penguasaan tanah di Negara ini. Diatas kebijakan sistem inilah selalu terjadi konflik yang berujung kepada terjadinya keresahan agraria. Kenyataan ini menunjukkan betapa mobilisasi politik petani merupakan ungkapan yang paling dramatis dari keresahan agraria yang tak jarang menyulut radikalisme petani terhadap negara sebagai wujud perlawanan petani terhadap sistem yang berlangsung pada saat itu.

Mobilisasi petani dalam konflik agraria saat ini berlangsung di desa Nambiki. Petani di desa Nambiki melakukan aksi bersama menentang status penguasaan lahan perkebunan PT. Perkebunan Nusantara II kebun Padang Brahrang yang berada di wilayah mereka. PTPN II merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada dibawah Departemen Pertanian Republik Indonesia. Pada masa lalu tepatnya antara

<sup>1</sup> Skripsi Sarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas. Dengan judul Gerakan Petani Melawan Penguasa (Studi Kasus Pendudukan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit PTPN II Oleh Petani di Desa Nambiki Kecamatan Selesai Kab.Langkat), 2003

<sup>2</sup> Sarjana Jurusan Ilmu Politik FISIP, Universitas Andalas, Padang, Juni 2003

<sup>3</sup> Dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP, Universitas Andalas saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Otonomi Daerah Universitas Andalas

<sup>4</sup> Dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP, Universitas Andalas saat ini menjabat sebagai Ketua Laboratorium Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas

tahun 1966-1967 menurut petani setempat, pihak PTPN II (pada waktu itu masih bernama Perusahaan Negara Perkebunan IX) melalui aparat birokrasi pemerintah dan militer telah melakukan perampasan hak atas penguasaan areal tanah mereka. Mereka difitnah dan dipaksa untuk menyerahkan tanah mereka. Kondisi sosial - politik yang terjadi pada saat itu menurut pihak petani membuat mereka tidak dapat berbuat apa - apa. Kemudian oleh pihak PNP IX areal pertanahan tersebut dijadikan kawasan perkebunan diantaranya kebun kelapa sawit. Usaha perkebunan kelapa sawit tersebut terus berlanjut sampai terjadinya restrukturisasi BUMN tersebut yang merubah status PNP IX menjadi Perusahaan Terbatas Perkebunan (PTP IX) dan terakhir mengalami merger dengan PTP II yang kemudian berubah nama menjadi PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) II. Pada masa penguasaan lahan oleh PTPN II inilah tepatnya awal tahun 1998 petani di desa Nambiki melakukan protes atas hak penguasaan lahan tersebut. Protes yang dilakukan dalam bentuk aksi bersama petani yang diwujudkan dalam bentuk "pendudukan" diatas lahan yang menjadi konflik. Aksi tersebut dilanjutkan dengan penebangan sebagian besar tanaman kelapa sawit yang ada di areal tersebut. Kemudian oleh pihak petani areal tersebut diberi patok - patok tanda batas dan dibagikan kepada petani - petani yang ikut dalam aksi tersebut. Aksi petani tersebut berjumlah sekitar 200 Kepala Keluarga (KK) dan masing KK mendapat lahan sekitar 1 hektar. Diatas lahan yang telah menjadi areal perladangan dan telah dibagi - bagi kepada para petani, para petani melakukan aktivitas pertanian seperti melakukan kegiatan bercocok tanam seperti jagung, sayur - mayur, padi darat, kacang - kacangan dan lain sebagainya. Petani juga mendirikan bangunan rumah sederhana di atas areal perladangan mereka masing - masing.

Aksi "reclaiming" yang dilakukan oleh petani di desa Nambiki atas lahan lahan yang telah mereka "duduki" dilakukan dengan mengangkat 3 isu utama yakni :

1. Secara hukum (tepatnya hukum agraria) menurut pihak petani merekalah yang berhak atas penguasaan lahan yang menjadi tengah menjadi konflik saat ini. Hal ini mereka buktikan dengan adanya (diantara mereka yang memiliki) Kartu Registrasi Pendaftaran Tanah (KRPT) yang dikeluarkan kepala kantor reorganisasi pemakaian tanah wilayah Sumatera Timur sesuai Undang-Undang Darurat No. 8 / 1954.
2. Menurut petani di desa Nambiki, Hak Guna Usaha (HGU) sebagai landasan hukum operasionalisasi kegiatan usaha perkebunan pada areal yang menjadi konflik yang dimiliki oleh pihak PTPN II yang tertuang dalam HGU No. 24 Tahun 1965 dan berlaku selama 35 tahun telah habis masa berlakunya tepatnya pada tanggal 6 Juli 2000. Dan menurut pihak petani pihak perkebunan wajib mengembalikan lahan yang telah habis masa HGUnya kepada masyarakat setempat. Sedangkan versi PTPN II HGU berakhir pada tahun 2020 karena HGU tersebut telah diperbaharui melalui sertifikat HGU NO.1 SK BPN No.35/BPN/90.
3. Secara ekonomis menurut petani di desa Nambiki, aksi yang mereka lakukan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar dibandingkan dengan kehadiran perkebunan yang besar ditengah - tengah kehidupan mereka.

Selama berlangsungnya aksi-aksi mereka selama ini, terlihat adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang hadir di tengah-tengah mereka seperti Persatuan

Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Sumatera Utara, Aliansi Gerakan Rakyat Sumatera Utara (AGRESU) dan Gerakan Rakyat untuk Reformasi Agraria (GERAG) yang ikut mendampingi perjuangan petani di desa Nambiki. Kemudian aksi *reclaiming* petani di desa Nambiki yang baru terjadi pada masa reformasi yakni pasca pemerintahan orde baru, terlihat adanya kebijakan HGU sebagai simbol ketidakadilan pemerintah terhadap mereka. Keadaan-keadaan ini menunjukkan adanya variabel dari luar lingkungan (*external environmen variabel*) petani di desa Nambiki yang masuk ke dalam lingkungan internal (*internal environment variabel*) petani di desa Nambiki yang melakukan aksi perlawanan dalam bentuk *reclaiming* tersebut.

Melihat pada fenomena gerakan petani yang terjadi di desa Nambiki ini peneliti mengadakan sebuah penelitian untuk mengetahui lebih dalam lagi hal-hal yang berkaitan dengan fenomena tersebut khususnya mengenai mengapa petani di desa Nambiki melakukan gerakan perlawanan dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara dan penyebab petani di desa Nambiki melakukan gerakan perlawanan. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada pengembangan ilmu sosial baik pada tataran teoritis maupun praktis.

#### Studi Kepustakaan

Gerakan Petani dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan terencana yang dilakukan sekelompok orang yang pekerjaannya bercocok tanam untuk mengadakan perubahan terhadap kondisi sosial yang dialami berkaitan dengan aktivitas mereka dalam bercocok tanam. Sedangkan Scott (1993) menyatakan perlawanan petani adalah semua tindakan oleh para anggota kelas tersebut untuk untuk melunakkan atau menolak tuntutan-tuntutan dari kelas yang lebih atas seperti negara dan mengajukan tuntutan-tuntutan tersendiri. Dari kedua defenisi diatas menunjukkan bahwa gerakan dan perlawanan petani merupakan sebuah bentuk gerakan sosial secara umum dimana Hout<sup>5</sup> mengungkapkan bahwa gerakan sosial (*social movement*) adalah suatu usaha, upaya dan tingkah laku kolektif untuk mengadakan perubahan yang ada di dalam masyarakat.

Dalam penelitian terhadap gerakan petani yang terjadi di desa Nambiki, peneliti secara umum menggunakan pendekatan kepada 3 unsur gerakan sosial yang ditawarkan Orum (1989). Ketiga unsur gerakan sosial tersebut mencakup gerakan reformasi dan revolusi. Unsur-unsur tersebut adalah organisasi, keyakinan atau cita-cita dan tindakan atau perilaku dimana masyarakat melakukannya. Ketiga unsur dalam gerakan sosial ini akan menuntun peneliti untuk menjawab cara gerakan perlawanan yang dilakukan petani di desa Nambiki.

*Organisasi gerakan* dimaksudkan untuk mengefektifkan koordinasi dan kontrol terhadap upaya-upaya dari bagian-bagian anggota gerakan sesuai tingkat kedudukan dan perannya. Adanya pembagian peran sesuai kedudukan terhadap masing-masing anggota gerakan menciptakan adanya unsur kepemimpinan dimana unsur ini ditujukan untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi<sup>6</sup>. Sehubungan dengan kepemimpinan dan organisasi, tipologi kedua aspek ini akan saling

<sup>5</sup> dalam Gunawan Wiradi, 2000

<sup>6</sup> Terry dalam Miftah Thoha, 1995

mempengaruhi terhadap masing-masing bentuknya. Maksudnya, kepemimpinan modern yakni kepemimpinan legal-rasional seperti yang dinyatakan Weber akan mencirikan organisasi yang dipimpinnya bersifat modern. Begitu juga sebaliknya kepemimpinan tradisional akan mencirikan organisasi yang dipimpinnya bersifat tradisional. Sementara itu Arief Budiman dan Olle Tornquist (2001) mengkategorikan gerakan perlawanan dari unsur organisasi menjadi 3 bentuk yakni gerakan dengan organisasi yang sangat longgar, gerakan dengan organisasi yang lebih ketat dan gerakan dengan organisasi organisasi yang lebih baik. Pengkategorian ini didasarkan kepada bagaimana organisasi tersebut mampu membentuk sebuah jaringan perlawanan yang solid ke tingkat yang lebih global, mulai dari tingkat daerah (lokal) sampai internasional berkaitan isu yang diangkat dalam gerakan perlawanan tersebut. Organisasi gerakan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah organisasi yang dibentuk petani dalam melakukan upaya gerakan yang mereka lakukan.

*Keyakinan atau cita-cita gerakan* merupakan unsur dalam gerakan sosial yang mengusulkan beberapa bentuk perubahan dalam institusi-institusi sosial dan politik. Keyakinan tersebut pada umumnya melawan legitimasi dari institusi yang lebih besar. Keyakinan dapat diartikan sebagai ideologi, dimana dalam makna politis ideologi merupakan suatu keyakinan dan kepercayaan yang mampu memberikan penjelasan sekaligus justifikasi terhadap tertib politik yang ada ataupun yang didambakan oleh sesuatu masyarakat, termasuk di dalamnya strategi untuk merealisasikannya. Dalam arti yang longgar, strategi-strategi pencapaian ini mencakup pula segenap proses, pengaturan kelembagaan atau bahkan programnya<sup>7</sup>. Scott dalam bukunya senjata orang-orang kalah (2000) menyatakan makna ideologis dalam sebuah perlawanan petani dapat dilihat dari perilaku dan tindak tanduk mereka. Ditinjau dari ideologi gerakan, maka tindakan-tindakan perlawanan petani di Indonesia merupakan simbol penolakan mereka terhadap ideologi pembangunanisme (*developmentalism*) yang merupakan wajah baru kapitalis yang banyak dipraktekkan pemerintah orde baru yang banyak memarjinalkan kelas petani sebagai sumber produksi maupun sebagai pemilik tanah<sup>8</sup>. Kenyataan ini tidak terlepas dari konsesus dari pendukung orde baru ketika rezim tersebut mulai berkuasa tentang perlunya stabilitas, rehabilitas dan pembangunan gaya kapitalis<sup>9</sup>. Ideologi dalam gerakan perlawanan petani yang terjadi di desa Nambiki memiliki kesamaan umum dengan ideologi gerakan perlawanan petani di Indonesia yakni anti terhadap ideologi pembangunanisme (kapitalis) yang ditunjukkan dengan pernyataan bahwa kehadiran kapitalis perkebunan yang dikelola negara di daerah mereka tidak memberi pengaruh ekonomi yang positif terhadap mereka dan yang terjadi malah sebaliknya. Pernyataan ini merupakan bagian dari isu yang diangkat petani di desa Nambiki dalam gerakan tersebut.

*Tindakan-tindakan dalam gerakan* merupakan perilaku anggota gerakan yang ditujukan kepada pencapaian dari tujuan gerakan. Tindakan ini tentunya tidak terlepas dari motif kelompok yang menggerakkan anggotanya untuk bertindak sesuai tujuan dibentuknya kelompok<sup>10</sup>. Secara tipikal tindakan perlawanan petani dalam sebuah

<sup>7</sup> Cahyono, 1986

<sup>8</sup> Fauzy, 1999

<sup>9</sup> Mas'ood, 1989

<sup>10</sup> Gerungan, 1996

perlawanan terbuka berlangsung dalam 4 pola tipikal yang dikaitkan dengan sumber daya yang dimanfaatkan dan hubungan-hubungan sosial yang diciptakan. Pola tipikal tersebut adalah pengendalian pada bentuk-bentuk setempat dari usaha swadaya (*self-help*), pengendalian pada sektor ekonomi non-petani, pengendalian pada bentuk patronase dan pengendalian kepada struktur-struktur proteksi keagamaan atau oposisi (scott, 1981). Pada kasus yang terjadi di desa Nambiki, pola tipikal perlawanan yang berlangsung mengarah kepada tipikal pengendalian bentuk-bentuk setempat dari usaha swadaya (*self-help*) dan pengendalian pada tipikal bantuan oposisi yakni bantuan dari LSM yang hadir ditengah-tengah mereka. Sementara itu tindakan-tindakan perlawanan petani tersebut menurut Kuntowijoyo (1994) tidak terlepas dari karakteristik khas di suatu wilayah lokal tempat perlawanan itu terjadi.

Untuk membahas penyebab terjadinya gerakan perlawanan petani di desa Nambiki, peneliti akan meninjau empat variabel yang ber-sinergi dimana variabel tersebut berasal dari lingkungan internal dan eksternal petani.

Dari variabel internal petani yakni alasan petani itu sendiri untuk ikut dalam gerakan. Dari variabel ini peneliti menggunakan pendekatan ekonomi politik baru yang di pelopori oleh Samuel L. Popkin. Pendekatan ekonomi ini berusaha memahami realitas politik dan bentuk sikap sosial lainnya dalam kerangka analisis, yang didasarkan pada aktor individual, yang selalu berusaha untuk mencapai kepentingan-kepentingannya. Asumsinya, manusia pada dasarnya egois, rasional dan selalu berupaya untuk memaksimalkan utilitas untuk dirinya<sup>11</sup>. Popkin dalam bukunya yang berjudul *Petani Rasional* (1986), menyatakan bahwa protes atau perlawanan petani ialah tindakan kolektif dan tergantung pada kemampuan kelompok atau kelas untuk mengorganisir dan membuat tuntutan-tuntutan. Jadi banyaknya pergerakan-pergerakan merupakan suatu ekspresi dari "kekuatan hijau" atau cerminan dari tumbuhnya kemampuan petani mengorganisir dan memperjuangkan hak-hak dan privelese-privelese yang dahulu pernah menolak mereka. Kemudian Popkin menyatakan perjuangan-perjuangan petani merupakan peperangan untuk untuk menjinakkan pasar dan birokrasi-birokrasi, bukan pergerakan-pergerakan untuk memulihkan kembali sistem-sistem "tradisional" yang identik dengan ekonomi subsistensi.

Sementara itu, variabel eksternal yang ikut menyebabkan terjadinya gerakan perlawanan petani di desa Nambiki adalah keterlibatan LSM yakni Agresu, Gerag dan PBHI dalam gerakan tersebut. Dimana peran LSM ini adalah *Pertama*, menyaring dan menyiapkan pendapat dan rumusan kepentingan yang jika tidak dilakukan pasti tidak akan didengar oleh pemerintah dan kalangan masyarakat umum lainnya. *Kedua*, menggairahkan dan mengupayakan upaya-upaya swadaya masyarakat dari pada menggantungkan diri kepada prakarsa negara. *Ketiga*, menciptakan forum pendidikan kewarganegaraan, membentuk masyarakat untuk membentuk usaha bersama (*co-operative ventures*) dan dengan demikian mencairkan sikap menyendiri (isolatif) serta membangkitkan tanggung jawab sosial yang lebih luas<sup>12</sup>. Peran inilah yang membawa LSM menjadi kelompok kepentingan (*interest group*) dan kelompok penekan (*pressure group*). Kehadiran LSM juga dapat menciptakan efek *the rallying point* yaitu

<sup>11</sup> Rachbini, 1994

<sup>12</sup> Saidi, 1995

efek yang dapat menciptakan efek solidaritas dari sekian banyak kepentingan dan membentuk basis massa pendukung. Budiman Soedjatmiko (1999) dalam artikelnya di harian Kompas menulis *the rallying point* dapat berbentuk jaringan organisasi, flatform perjuangan, momentum politik/kehadiran pemimpin politik.

Disamping LSM, variabel eksternal lainnya adalah kebijakan HGU PTPN II yang mungkin menimbulkan ketidakadilan terhadap anggota gerakan perlawanan petani di desa Nambiki sehingga menjadi alasan untuk melakukan gerakan perlawanan seperti pandangan yang disampaikan Loekman Soetrisno tentang penyebab timbulnya gerakan perlawanan. Dan variabel terakhir adalah perubahan sosial yang terjadi pada masa reformasi yang dimulai pada Mei 1998. Dimana Kartodirjo<sup>13</sup> mengakui bahwa munculnya gerakan petani dipengaruhi akumulasi masalah sosial diantaranya perubahan sosial yang terjadi.

#### Metodologi Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan bentuk studi kasus (*case study*). Tipe dari penelitian ini adalah eksplanatoris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan telaah arsip. Pemilihan informan dilakukan secara probabilitas dengan teknik *snowball sampling* (bola salju) yang menggunakan prinsip kejenuhan data. Unit analisis dari penelitian ini adalah kelompok petani di desa Nambiki yang melakukan gerakan perlawanan. Analisa Data dilakukan dengan menggunakan strategi pejudohan pola yakni membandingkan pola empiris dengan pola yang diprediksi yang terangkum dalam proposisi penelitian. Lokasi penelitian ini berada di desa Nambiki kecamatan Selesat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara.

#### Temuan dan Pembahasan Penelitian

##### Cara Gerakan Petani

Gerakan perlawanan petani yang berlangsung di desa Nambiki dalam bahasa internal di komunitas mereka disebut sebagai sebuah bentuk perjuangan kelompok petani. Perjuangan diawali oleh sekelompok kecil orang yang berusaha menghidupkan kembali perjuangan yang pernah berlangsung pada masa sebelumnya yakni ketika rezim orde baru masih berkuasa dimana pada masa sebelumnya perjuangan mengatasnamakan kelompok 104 yang beranggotakan 104 petani. Upaya revitalisasi kelompok perjuangan yang pernah melakukan gerakan perlawanan pada sekitar tahun 1979 dan mengupayakan mobilisasi massa tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ibu Penganta Sitepu (80 thn) salah seorang anggota gerakan. Dalam wawancara yang dilakukan disela-sela istirahat di rumahnya terungkap bahwa gerakan petani tersebut diawali oleh beberapa aktor individual. Berikut penuturan beliau :

*"Pada sekitar bulan Februari 1998 saya didatangi oleh (alm) K.Sitepu yang masih sebangun dengan saya. Beliau meminta saya untuk ikut rapat untuk membicarakan rencana perjuangan baru lanjutan dari perjuangan*

<sup>13</sup> dalam Pratikto, 2000

kelompok 104 yang belum berhasil pada tahun 1979. Saya diundang karena pernah tergabung dalam kelompok 104 tersebut"<sup>14</sup>.

Upaya revitalisasi organisasi ini meningkat menjadi penguatan organisasi perjuangan dengan hadirnya beberapa LSM yang hadir ditengah-tengah petani. Upaya penguatan ini terlihat dari bertambahnya anggota gerakan dari luar eks kelompok 104, penguatan organisasi ini diatur oleh tata tertib kelompok perjuangan petani. Tata tertib tersebut dibuat dan disusun melalui sebuah musyawarah kerja yang melibatkan petani, Agresu, Gerag dan PBHI. Tata tertib mengatur tentang hak dan kewajiban anggota gerakan sehingga gerakan dapat berlangsung lebih sistematis. Cara gerakan yang dilakukan dengan revitalisasi kelompok perjuangan yang kemudian dilanjutkan dengan penguatan organisasi perlawanan merupakan sebuah cara perlawanan yang bersifat non-frontal karena tindakan-tindakan dalam kegiatan ini tidak memiliki implikasi langsung dengan sumber konflik (lahan) yang mempertentangkan kepentingan negara dan kepentingan petani.

Cara perjuangan selanjutnya adalah aksi-aksi petani di sekitar lahan yang menjadi konflik. Aksi ini dilakukan bersama-sama dengan aktivis dari Agresu, Gerag dan PBHI. Aksi-aksi di sekitar lahan dilakukan dengan cara menduduki dan menguasai lahan (*reclaiming*) yang diisi dengan kegiatan membuat dan memasang poster-poster/spanduk yang berisi pernyataan sikap petani di sekitar lahan, mematok lahan, mendirikan gubuk-gubuk sebagai posko perjuangan, menerima advokasi tentang masalah agraria dari LSM dan yang terakhir adalah penebangan dan pembersihan lahan dari tanaman kelapa sawit sehingga petani dapat melakukan kegiatan bercocok tanam di lahan tersebut. Dalam aksi-aksi di sekitar lahan petani sering mendapat teror baik dari pihak perkebunan maupu dari aparat keamanan. Bela Pande (38 thn) salah seorang anggota gerakan menuturkan sbb :

*"Aparat perkebunan yang di back up aparat keamanan (brimob) berulang kali masuk lahan yang dikuasai petani dan merusak patah, gubuk yang mereka dirikan serta berusaha mengusir massa petani serta aktivis LSM yang tergabung di dalamnya untuk keluar dari lahan yang menjadi konflik. Aparat keamanan (brimob) tak segan-segan melepaskan tembakan ke udara untuk menakut-nakuti massa petani. Namun massa petani selalu menghindari bentrak fisik sesuai instruksi LSM yang mendampingi petani."<sup>15</sup>*

Tetapi secara *de-facto* sampai kini kelompok petani masih berhasil menguasai dan mengusahai lahan tersebut. Cara gerakan petani yang dilakukan dalam aksi-aksi di sekitar lahan yang menjadi konflik merupakan sebuah cara frontal dimana kelompok petani telah mengakhiri dominasi dan kepentingan negara atas lahan tersebut. Cara-cara gerakan seperti ini dapat dikelompokkan sebagai sebuah bentuk perlawanan lokal.

Selain cara-cara yang telah diungkapkan diatas, gerakan petani di desa Nambiki juga dilakukan dengan cara perjuangan di Luar lahan/lapangan. Cara ini

<sup>14</sup> Wawancara tgl.11 Februari 2003

<sup>15</sup> (wawancara tgl.25/2/2003).

terbagi dalam dua bagian yakni perjuangan dengan cara menyampaikan permasalahan secara tertulis yang dilakukan baik oleh kelompok petani sendiri maupun didampingi oleh LSM kepada berbagai instansi pemerintahan (pusat dan daerah) baik di eksekutif maupun legislatif (DPR/DPRD) dan yang kedua adalah demonstrasi (unjuk rasa dengan pegerahan massa) ke berbagai instansi yang dianggap bertanggung jawab atas permasalahan yang dihadapi kelompok petani tersebut yang juga dilakukan bersama LSM yang mendampingi. Cara perjuangan kelompok petani melalui penyampaian masalah tertulis diantaranya dilakukan kepada Gubernur Sumatera Utara, Kepala Kanwil BPN Sumatera Utara, Bupati Langkat, kantor kementerian Agraria (pada masa kabinet reformasi), Kantor Menneq BUMN, Departemen Pertanian, DPRD Tk II Langkat, DPRD Tk I Sumut, DPR Pusat, Dephankam, Mabes Polri dan berbagai instansi lainnya. Cara gerakan lewat demonstrasi dilakukan ke berbagai instansi dengan aksi yang terbesar terjadi pada tanggal 25 Mei 2000 yang diawali di Kantor Gubernur Sumatera Utara dan berakhir dengan kerusuhan di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara II di Tanjung Morawa. Kerusuhan tersebut terjadi karena pihak perkebunan yang tidak akomodatif dan sikap refresif yang ditunjukkan aparat keamanan (sabhara dan brimob). Dalam peristiwa yang dikenal dengan sebutan "Tanjung Morawa Berdarah" tersebut beberapa demonstran cedera akibat terkena tembakan peluru dan gas air mata<sup>16</sup>. Cara-cara gerakan yang terangkum dalam perjuangan di luar lahan/lapangan juga merupakan sebuah tindakan frontal yang mencoba untuk tetap masuk ke dalam struktur negara dan meminta negara untuk mengubah kebijakannya sehingga secara *de-jure* (hukum) kelompok perjuangan petani mendapat pengakuan dari pemerintah atas aksi-aksi yang telah mereka lakukan terkait tuntutan mereka. Tindakan ini frontal karena pemerintah memiliki kepentingan yang berseberangan dengan tuntutan petani tersebut. Cara-cara perjuangan kelompok petani yang menuntut perubahan kebijakan atas status lahan yang diklaim PTPN II melalui sertifikat HGU yang mereka miliki dapat dikelompokkan sebagai sebuah bentuk *perlawanan kebijakan*.

Melihat cara-cara gerakan perlawanan petani yang dilakukan kelompok petani perjuangan di desa Nambiki, terlihat adanya kesamaan pola tipikal perlawanan dengan 2 pola tipikal dari 4 pola tipikal yang disebutkan Scott dalam bentuk perlawanan petani yang terbuka, dimana ciri perlawanan terbuka itu sendiri diantaranya berlangsung secara sistematis, terorganisir dan berusaha mengakhiri dominasi dari pihak yang menjadi lawan. Kedua pola tipikal perlawanan Scott yang juga berlangsung di desa Nambiki adalah perlawanan dengan pengendalian usaha setempat/swadaya yang setidaknya ditunjukkan kelompok petani desa Nambiki dengan kekuatan massa yang siap setiap saat untuk melakukan aksi-aksi gerakan, sedangkan pola tipikal lainnya adalah pengendalian pada oposisi yang dapat dilihat dari peran LSM yang membantu gerakan perlawanan petani seperti upaya penguatan organisasi perlawanan petani melalui pembuatan tata tertib kelompok perjuangan petani.

#### Penyebab Gerakan Petani

Penyebab dari timbulnya gerakan perlawanan petani tidak terlepas dari kepentingan ekonomi politik dari individu anggota gerakan. Hal ini dapat terlihat dari

<sup>16</sup> wawancara pd tgl 12/2/2003 dengan Areh Bangun, 33 thn, demonstran sekaligus korban



observasi dan wawancara dengan para anggota gerakan baik secara individu maupun kelompok (*FGD/Foccus Group Discussion*). Keinginan untuk memaksimalkan nilai utilitas atas aksi-aksi yang mereka lakukan tergambar dari wawancara dengan kelompok petani di desa Nambiki. Berikut petikan wawancaranya :

"...dengan perjuangan secara kelompok ini kami dapat menguasai lahan dan melakukan kegiatan bertani yang dapat memberikan nilai ekonomis dan keuntungan ekonomis, dan kalau dilakukan secara sendiri-sendiri akan sangat sulit tercapai...".<sup>17</sup>

Dari observasi juga terlihat bahwa aktivitas mereka dalam mengolah lahan bukanlah melakukan aktifitas pertanian yang bersifat subsistensi karena mereka menjual produksi mereka selain untuk keperluan mereka. Kemudian disamping itu, para petani juga sebelum mendapatkan keuntungan ekonomis saat ini terlebih dahulu melakukan "investasi" materi dan waktu yang dilakukan dengan cara pengumpulan dana dari para anggota kelompok petani untuk membiayai berbagai aksi-aksi gerakan dan ikut terlibat langsung dalam gerakan tersebut. Dalam perlawanan petani yang bermotif subsistensi aksi "investasi" merupakan suatu hal yang dapat dikatakan tidak mungkin untuk dilakukan. Sebaliknya motif ekonomi politik dalam gerakan perlawanan petani di desa Nambiki lebih merupakan alasan yang tepat karena para petani mengorganisir diri untuk memperjuangkan kepentingannya secara bersama-sama agar memperoleh nilai posisi tawar (*bargaining*) yang lebih baik terhadap lawannya (negara).

Dalam upaya mencapai kepentingan ekonomi politiknya, kelompok petani perjuangan bersinergi dengan kepentingan pihak eksternal yang memberi implikasi positif terhadap tujuan mereka. Pihak eksternal pertama adalah LSM (Agresu, Gerag dan PBHI) yang bekerja secara kolektif. Walaupun tidak terlibat dari awal namun peran LSM tersebut sangatlah besar. Agresu yang merupakan orop yang gencar membangun organisasi perlawanan rakyat dari berbagai kalangan seperti nelayan, buruh, petani dan sebagainya. Salah satu organ perlawanan tersebut dan beraliansi dengan Agresu adalah Gerag yang mengorganisasi perlawanan petani di Sumut. Kenyataan ini menunjukkan aktivitas dari Gerag tidak bisa terlepas dari Agresu. Gerag sendiri pada perlawanan tingkat nasional berafiliasi ke Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA). Keterlibatan PBHI sendiri lebih kepada individual pengacaranya yang terlibat sebagai penasihat hukum di Agresu. Agresu sendiri sebagai orop memiliki tujuan untuk mewujudkan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai sektor seperti politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Keterlibatan LSM dalam gerakan perlawanan petani di desa Nambiki secara umum merupakan hasil settingan dari Agresu. LSM yang terlibat dalam gerakan tersebut berusaha memanfaatkan momentum gerakan yang berlangsung untuk mencapai tujuan demokratisasi dalam berbagai bidang sekaligus seperti bidang politik agraria, keadilan ekonomi, dan hukum.

Variabel lainnya yang mendukung gerakan perlawanan petani di desa Nambiki adalah kondisi reformasi yang terjadi di Indonesia mulai 21 Mei 1998. Ini terlihat dari

<sup>17</sup> Wawancara FGD dengan kelompok petani dusun Ilaman Hati desa Nambiki pada tgl 1 Maret 2003

pernyataan yang diungkapkan kelompok petani dalam wawancara yang dilakukan. Berikut petikan wawancaranya :

"...jatuhnya orde baru menimbulkan keberanian pada anggota kelompok dan orang lainnya yang kemudian bergabung ke dalam kelompok untuk berjuang secara bersama-sama..."<sup>14</sup>

Disamping itu, keberadaan LSM yang membantu gerakan perlawanan petani di desa Nambiki juga bagian dari hasil reformasi, dimana pembentukan Agressu dan Gerag dilakukan setelah reformasi berlangsung. Fakta ini menunjukkan perubahan sosial dalam bentuk reformasi di Indonesia ikut memberi implikasi positif bagi gerakan perlawanan petani yang berlangsung di desa Nambiki.

Sementara itu variabel kebijakan HGU PTPN II yang tertuang dalam Sertifikat HGU No.1 SK BPH No.35/HGU/BPN/90 yang dianggap sebagai pemicu terjadinya gerakan karena dianggap tidak adil oleh sebagian petani yang memiliki KRPT menjadi tidak relevan untuk dijadikan alasan gerakan perlawanan secara kelompok, dengan catatan ketidakadilan tersebut dikaitkan antara kebijakan HGU dengan KRPT yang dimiliki petani. Karena jumlah petani pemegang KRPT tidak sebanding dengan petani yang terlibat dalam gerakan perlawanan tersebut. Fakta ini dipertegas oleh aturan yang tertuang dalam tata tertib kelompok petani perjuangan yang mengisyaratkan bolehnya petani yang tidak terkait secara sejarah dengan kelompok 104 untuk masuk ke dalam kelompok petani perjuangan dan secara bersama-sama melakukan gerakan perlawanan. Namun motif ketidakadilan mungkin saja menjadi alasan dari individu tertentu dari anggota kelompok petani perjuangan untuk melakukan gerakan perlawanan.

#### Kesimpulan

Dalam gerakan perlawanan yang dilakukan oleh kelompok petani di desa Nambiki berlangsung dalam bentuk terbuka yang dilakukan dengan 2 cara yakni cara non frontal dan cara frontal. Cara non frontal dilakukan dengan cara penguatan organisasi perlawanan sebagai wadah untuk membuat perencanaan dalam melakukan gerakan. Sedangkan cara frontal dilakukan dalam dua bentuk tindakan yakni; *Pertama*, perlawanan lokal. Perlawanan lokal dilakukan di areal di wilayah konflik dan bertujuan untuk menguasai lahan secara *de facto*. *Kedua*, Perlawanan kebijakan yang dilakukan dengan cara unjuk rasa/demonstrasi dan penyampaian masalah tertulis dimana dalam aksi ini kelompok petani masuk ke dalam struktur Negara dan melakukan upaya tekanan politis sehingga pada akhirnya pemerintah diharapkan bersedia mengakomodir dan membuat kebijakan sesuai tuntutan kelompok petani. Tujuan dari bentuk perlawanan seperti ini adalah mendapat pengakuan hukum (*de jure*) dari Negara atas lahan yang telah dikuasai secara *de facto*.

Timbulnya gerakan perlawanan petani di desa Nambiki diawali oleh beberapa aktor individual yang kemudian mengorganisir massa dan secara bersama-sama membentuk organisasi gerakan sebagai wadah dalam melakukan perlawanan kolektif.

<sup>14</sup> Wawancara dengan kelompok petani dusun Idaman Hati desa Nambiki pada tgl.1 Maret 2003

Motif dari kelompok ini melakukan gerakan perlawanan adalah ekonomi politik yakni berusaha meraih keuntungan dan memaksimalkan nilai utilitas atas lahan yang diperjuangkan secara kolektif. Dalam perkembangan gerakan, kepentingan ekonomi politik kelompok petani yang sedang diperjuangkan melalui gerakan perlawanan mendapat bantuan dari kepentingan politik kalangan tengah yakni ornop-ornop yang kemudian membantu gerakan perlawanan petani di desa Nambiki diantaranya Agresu, Gerag dan PBHI Sumatera Utara. Dimana kepentingan politik kalangan menengah ini berkuat kepada issue dan konsep demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sinergisasi kepentingan yang beraliansi dalam gerakan perlawanan petani memanfaatkan kondisi reformasi yang merupakan sebuah kondisi sosial yang kondusif untuk mendorong terlaksananya upaya perwujudan kedua motif tersebut. Sedangkan issue ketidakadilan Negara terhadap kelompok petani terkait implementasi HGU PT.Perkebunan Nusantara II kebun Padang Brahrang No: 35/HGU/BPN/90 tidak beralasan sebab jumlah anggota kelompok yang memiliki kaitan sejarah dan alas hak atas lahan tersebut (KRPT) jumlahnya tidak relevan dengan jumlah anggota kelompok yang melakukan gerakan perlawanan saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Arief dan Tornquist, Oile. *Aktor Demokrasi; Catatan Tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia*, Institut Studi Arus Informasi: Yogyakarta, 2001.
- Cahyono, Cheppy Hari. *Ideologi Politik*, Penerbit PT.Hanindita: Yogyakarta, 1986.
- Fauzy, Noer. *Petani dan Penguasa; Dinamika Perjalanan Politik Agraria di Indonesia*, INSIST, KPA bekerjasama dengan Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1999.
- Gerungan, W.A. *Psikologi Sosial*, Gresca: Bandung, 1996.
- Kuntowijoyo, *Radikalisasi Petani*, Benteng: Yogyakarta, 1994.
- Mas'oe'd, Mochtar. *Ekonomi dan Struktur Politik; Orde Baru 1966-1971*, LP3ES: Jakarta, 1989.
- Orum, Anthony M. *Introduction To Political Sociology; Anatomy of The Body Politic*, Bab 12 "reformasi dan revolusi", terjemahan Bakaruddin R. Ahmad, Englewood Cliffs: New Jersey, Prentice Hall, 1989.
- Papkin, Samuel L. *Petani Rasional*, Yayasan Padamu Negeri: Jakarta, 1986.
- Praktikto, Fadjar, *Gerakan Rakyat Kelaparan; Gagalnya Politik Radikalisasi Petani*, Media Pressindo: Yogyakarta, 2000.
- Rachbini, Didik J. "Perspektif Teori Ekonomi Politik Baru: Kajian Terhadap Negara, Masyarakat dan pasar", *Prisma* 3, Maret, 1994.
- Sudjatmiko, Budiman. "Gerakan Mahasiswa Sebagai *The Rallying Point*", Sebuah Tulisan dalam harian Kompas. Sabtu 10 April Tahun 1999.
- Saidi, Zaim. *Secangkir Kopi Max Havelaar; LSM dan kebangkitan Masyarakat*, PT.Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan YLKI: Jakarta, 1995.
- Scott, James C. *Moral Ekonomi Petani*, LP3ES: Jakarta, 1981.
- \_\_\_\_\_. *Perlawanan Kaum Tani*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 1993.
- \_\_\_\_\_. *Senjatanya Orang-Orang Kalah; Bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani di Asia Tenggara*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2000.
- Thoha, Miftah. *Kepeimpinan Dalam Manajemen*, Rajawali Pers: Jakarta, 1995.
- Wiradi, Gunawan. *Reformasi Agraria; Perjalanan Yang Belum Berakhir*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2000.